

ABSTRAK

Ajeng Yulia Abdilla Putri, NIM. 126103202093, Implementasi SE Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, Pembimbing: Muksin, M.H

Kata Kunci : Implementasi surat edaran, Pembebebasan biaya perkara (prodeo), Masyarakat tidak mampu.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan kebijakan pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung berjalan kurang maksimal sebelum adanya Surat Edaran Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2022. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan perkara dalam layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung? 2) Apa kendala-kendala Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan layanan hukum prodeo? 3) Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkara dalam layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan layanan hukum prodeo. 3) Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang dilakukan yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan ketekunan penegamatan dan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan kebijakan pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Pengadilan harus memaksimalkan penyampaian informasi terkait kebijakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam menyampaikan informasi terkait dengan adanya kebijakan layanan pembebasan biaya perkara menggunakan 3 cara yaitu : a) Melalui petugas PTSP. Petugas PTSP menyampaikan informasi terkait adanya kebijakan layanan pembebasan biaya perkara pada saat masyarakat datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara perdata, b) Melalui papan informasi. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung juga menyediakan informasi terkait kebijakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) melalui papan informasi yang dipajang di area yang sering dilalui masyarakat saat ke pengadilan seperti ruang tunggu dan setelah pintu masuk pengadilan. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung juga menyediakan tayangan video menggunakan layar televisi yang menayangkan informasi terkait kebijakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di ruang tunggu depan ruangan posbakum pengadilan. c) Melalui web pengadilan dan media sosial. Informasi dapat diakses pada web Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. 2) Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan kebijakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) memiliki berbagai kendala diantaranya : a) Jumlah dana DIPA Pengadilan yang terbatas pada tiap tahunnya sehingga pemberian pembebasan biaya kurang maksimal karena melihat dan menyesuaikan besarnya dana DIPA, b) Keterbatasan karyawan yang menyebabkan penyampaian informasi hanya dilakukan oleh petugas PTSP dan penyebaran informasi kurang merata pada masyarakat, c) Penyampaian informasi yang dilakukan kurang maksimal. Penyampaian informasi hanya dilakukan ketika masyarakat datang untuk mengajukan permohonan atau gugatan. Sosialisasi belum aktif dilakukan dan pemberian informasi dengan datang langsung kepada masyarakat belum ada. Juga belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait kebijakan layanan pembebasan biaya perkara. 3) Setelah Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2022 terbit, penyampaian informasi dan pelaksanaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung tidak banyak berubah dari sebelum surat edaran ini terbit. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung pernah melakukan sosialisasi terkait Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) ini untuk menindak lanjuti terbitnya surat edaran ini. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya belum ada lagi kegiatan semacamnya terkait kebijakan ini.

ABSTRACT

Ajeng Yulia Abdilla Putri, NIM 126103202093, Implementation of SE Director General of Badilum Supreme Court No. 1 of 2022 on the Optimization of Legal Services for Case Fee Waivers (Prodeo) (Case Study at the District Court of Tulungagung), Constitutional Law Study Program, State Islamic University Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, Supervisor: Muksin, M.H

Keywords: Implementation of Circular Letter, Case Fee Waiver (Prodeo), Economically Disadvantaged Community.

This research is motivated by the implementation of the case fee waiver (prodeo) policy at the District Court of Tulungagung. Case Fee Waiver services allow the state to bear the costs of the litigation process, so that individuals or groups who are economically disadvantaged can litigate for free. This service applies at the first instance, appeal, cassation, and judicial review stages. The implementation of prodeo cases at the District Court of Tulungagung was less than optimal before the issuance of Circular Letter of the Director General of Badilum Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1 of 2022. Given this issue, the researcher aims to investigate how the implementation of Circular Letter No. 1 of 2022 on the Optimization of Legal Services for Case Fee Waivers (Prodeo) has been carried out at the District Court of Tulungagung.

The research questions used in this study are: 1) How is the implementation of the case fee waiver (prodeo) service at the District Court of Tulungagung? 2) What are the obstacles faced by the District Court of Tulungagung in implementing the prodeo legal services? 3) How is the implementation of the Circular Letter of the Director General of the General Court Administration No. 1 of 2022 on the Optimization of Prodeo Legal Services for Economically Disadvantaged People at the District Court of Tulungagung?

The objectives of this research are: 1) To understand how the case fee waiver (prodeo) service is implemented at the District Court of Tulungagung. 2) To identify the obstacles faced by the District Court of Tulungagung in implementing prodeo legal services. 3) To analyze the implementation of the Circular Letter No. 1 of 2022 on the Optimization of Prodeo Legal Services for Economically Disadvantaged People at the District Court of Tulungagung.

This study uses an empirical legal research method with a statutory and case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis technique involves data presentation and drawing conclusions. Data validity is checked through perseverance in observation and data triangulation.

The results of the study show that: 1) The implementation of the case fee waiver (prodeo) policy at the District Court of Tulungagung has been carried out, but the implementation is less than optimal. The court must maximize the dissemination of information regarding the case fee waiver policy for economically disadvantaged communities. The District Court of Tulungagung disseminates information on the case fee waiver policy in three ways: a) Through the PTSP officers. PTSP officers provide information about the case fee waiver policy when people come to the court to register civil cases, b) Through information boards. The District Court of Tulungagung also displays information about the case fee waiver policy (prodeo) on information boards placed in areas frequently passed by the public, such as waiting rooms and areas after the entrance to the court. The court also broadcasts a video on a television screen showing information about the case fee waiver policy in the waiting room in front of the court's legal aid room, c) Through the court's website and social media. Information is accessible on the website of the District Court of Tulungagung. 2) The District Court of Tulungagung faces several obstacles in implementing the case fee waiver (prodeo) policy, including: a) Limited DIPA (Budget Implementation Document) funds for the court each year, which restricts the extent of the case fee waivers, b) Limited staff, which leads to information being disseminated only by PTSP officers, causing uneven distribution of information among the public, c) The dissemination of information is not optimal. Information is only provided when individuals come to file a lawsuit or request a waiver. There has been no active socialization, and information has not been directly communicated to the public. Additionally, there is no cooperation with the government regarding the case fee waiver policy. 3) After the issuance of the Circular Letter No. 1 of 2022 from the Director General of the General Court Administration, the dissemination of information and the implementation of the case fee waiver policy at the District Court of Tulungagung did not change significantly from the period before the circular was issued. The District Court of Tulungagung did conduct socialization regarding the case fee waiver policy to follow up on the issuance of this circular. However, no such activities have been carried out in subsequent years regarding this policy.

الملخص

اجع يوليا عبد الله فوتري، رقم تعريف الطالب ١٢٦١٠٣٢٠٢٠٩٣، تنفيذ الرسالة التعميمية للمدير العام للمحكمة العليا في باديلوم رقم ١ لعام ٢٠٢٢ بشأن تحسين الخدمات القانونية للإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) (دراسة حالة في محكمة مقاطعة تولونجاجونج ريجنسي)، برنامج دراسة القانون الدستوري، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونجاجونج ٢٠٢٤، المشرف: موكسين، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: تنفيذ الرسائل التعميمية، الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو)، الفقراء.

الدافع وراء هذا البحث هو تنفيذ سياسة الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) في محكمة مقاطعة تولونجاجونج. خدمة الإعفاء من رسوم القضايا هي تحمل الدولة لتكاليف التقاضي في تعميم المحكمة بحيث يمكن لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تعميم المحكمة أن يترافعوا في التعميم مجاناً. تطبق خدمات الإعفاء من رسوم الدعاوى على المستوى الأول ومستوى الاستئناف ومستوى النقض والمراجعة القضائية. يعمل تنفيذ القضايا المجانية في محكمة مقاطعة تولونجاجونج ريجنسي أقل من الرسالة التعميمية المثلى بسبب الرسالة التعميمية للمدير العام لباديلوم للمحكمة العليا في إندونيسيا رقم ١ لعام ٢٠٢٢. الرسالة التعميمية بحيث أنه مع وجود مشكلة الرسالة التعميمية، يريد الباحث معرفة الرسالة التعميمية إلى أي مدى يتم تنفيذ الرسالة التعميمية للمدير العام لباديلوم للمحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠٢٢ بشأن تحسين الخدمات القانونية للإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) في محكمة مقاطعة تولونجاجونج.

صيغ المشكلة المستخدمة في هذه الدراسة هي: (١) كيف يتم تنفيذ القضايا في خدمة الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) في محكمة مقاطعة تولونجاجونج؟ (٢) ما هي المعوقات التي تواجه محكمة مقاطعة تولونجاجونج ريجنسي في تنفيذ خدمة الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) في محكمة مقاطعة تولونجاجونج؟ (٣) كيف يتم تنفيذ الرسالة التعميمية للمدير العام لوكالة المحاكم العامة رقم ١ لعام ٢٠٢٢ بشأن تحسين الخدمات القانونية (بروديو) للمحرومين في محكمة مقاطعة تولونجاجونج؟

أهداف هذا البحث هي (١) معرفة كيفية تنفيذ القضايا في خدمة الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) في محكمة مقاطعة تولونجاجونج. (٢) معرفة العقبات التي تواجهها محكمة مقاطعة تولونجاجونج ريجنسي في تنفيذ الخدمات القانونية المجانية. (٣) معرفة تنفيذ الرسالة التعميمية للمدير العام لوكالة المحاكم العامة رقم ١ لعام ٢٠٢٢ بشأن تحسين الخدمات القانونية المجانية للمجتمعات المحرومة في محكمة مقاطعة تولونجاجونج المحلية.

إن منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني القانوني التجريبي باستخدام المنهج القانوني ومنهج الحالة. وتتمثل تقنيات جمع البيانات في الملاحظة

والمقابلات والتوثيق. أما تقنيات تحليل البيانات المستخدمة فهي عرض البيانات واستخلاص النتائج. ويتم التحقق من صحة البيانات المستخدمة باستخدام استمرار الملاحظة وتثليث البيانات.

أظهرت النتائج ما يلي: (١) تم تنفيذ سياسة الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) في محكمة مقاطعة تولونغونغ الإقليمية، ولكن التنفيذ ليس على النحو الأمثل. يجب على المحكمة أن تزيد من توصيل المعلومات المتعلقة بسياسة الإعفاء من رسوم القضايا للفقراء. تستخدم محكمة مقاطعة تولونجانونج في نقل المعلومات المتعلقة بوجود سياسة خدمة الإعفاء من رسوم القضايا ٣ طرق، وهي: أ) من خلال موظف الخدمة المتكاملة الشاملة. يقوم موظف الخدمة المتكاملة الموحدة بنقل المعلومات المتعلقة بوجود سياسة خدمة الإعفاء من رسوم القضايا عندما يأتي الجمهور إلى المحكمة لتسجيل قضية مدنية، ب) من خلال لوحة المعلومات. كما تقدم محكمة تولونجانونج الجزئية أيضًا المعلومات المتعلقة بسياسة خدمات الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) من خلال لوحات المعلومات المعروضة في المناطق التي يسافر إليها الجمهور عند الذهاب إلى المحكمة تعميمًا مثل غرفة الانتظار والتعميم بعد مدخل المحكمة. كما توفر محكمة تولونغونغ الجزئية عرض فيديو باستخدام شاشة تلفزيونية تعرض المعلومات المتعلقة بسياسة الإعفاء من رسوم المحكمة (بروديو) في غرفة الانتظار أمام غرفة البورباكوم بالمحكمة. ج) من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة ووسائل التواصل الاجتماعي. يمكن الوصول إلى المعلومات من خلال التعميمات على الموقع الإلكتروني لمحكمة مقاطعة تولونغونغ. ٢) تواجه محكمة تولونغانونج الجزئية في تنفيذ سياسة خدمة الإعفاء من رسوم الدعاوى (بروديو) عقبات مختلفة منها: أ) أن مبلغ أموال الإعفاء من الرسوم الذي تحصل عليه المحكمة محدود في كل عام في تعميمات المحكمة بحيث يكون تقديم الإعفاءات من الرسوم أقل من الأمثل لأنه يرى ويعدل مبلغ أموال الإعفاء من الرسوم، ب) محدودية الموظفين مما يجعل تقديم المعلومات لا يتم إلا من قبل موظفي الخدمة المتكاملة ذات المحطة الواحدة ويكون نشر المعلومات أقل توزيعًا بالتساوي على الجمهور، ج) تقديم المعلومات ليس هو الأمثل. يتم توصيل المعلومات فقط عندما يأتي الجمهور لتقديم طلب أو دعوى قضائية. لم يتم تنفيذ التثقيف الاجتماعي بشكل فعال، ولا يوجد حتى الآن تقديم المعلومات عن طريق القدوم مباشرة إلى المجتمع. كما لم يكن هناك أي تعاون مع الحكومة فيما يتعلق بسياسة خدمة الإعفاء من رسوم القضايا. ٣) الرسالة التعميمية بعد نشر الرسالة التعميمية للمدير العام للمحاكم العامة للمحكمة العليا في إندونيسيا رقم ١ لعام ٢٠٢٢، لم يتغير كثيرًا عن الرسالة التعميمية قبل نشر هذه الرسالة التعميمية تسليم المعلومات وتنفيذ خدمات الإعفاء من رسوم القضايا في محكمة مقاطعة تولونجانونج. وقد أجرت محكمة مقاطعة تولونغانونج التنشئة الاجتماعية المتعلقة بسياسة خدمات الإعفاء من رسوم القضايا (بروديو) لمتابعة إصدار هذا الخطاب التعميمي. ومع ذلك، بالنسبة لسنوات الرسالة التعميمية التالية لم يكن هناك المزيد من أنشطة الرسالة التعميمية المتعلقة بهذه السياسة.